



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT PRESIDEN  
**SUB UNIT KERJA** : DEPUTI KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN BIDANG PROTOKOL, PERS, DAN MEDIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : BEY TRIADI MACHMUDIN
2. Jabatan : DEPUTI KEPALA SEKRETARIAT PRESIDEN BIDANG PROTOKOL, PERS, DAN MEDIA
3. NHK : 146039

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.650.000.000

1. Tanah Seluas 300 m<sup>2</sup> di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m<sup>2</sup>/79 m<sup>2</sup> di TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 310.000.000

1. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1973, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 100.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.105.858.259
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.165.858.259
III. HUTANG	Rp.	48.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.117.858.259

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.